



Rp14 Miliar untuk Tangani Sampah

Menanti Wajah Berbeda TPST Piyungan

YOGYA. TRIBUN - DPRD DIY menyebutkan anggaran untuk penanganan sampah di DIY pada tahun 2020 dianggarkan Rp14 miliar.

Kami berupaya menjaga agar TPST bisa dipakai dan tidak mengganggu masyarakat.

Huda Tri Yudiana
Wakil Ketua DPRD DIY

Mengurai Sampah

- Tahun ini anggaran yang dialokasikan untuk TPST Piyungan Rp3,5 miliar. Pada tahun 2020, Pemda DIY mengalokasikan Rp14 miliar untuk menangani persoalan sampah.
- Anggaran ini di antaranya digunakan membangun sejumlah konstruksi di TPST Piyungan.
- Dengan kenaikan anggaran sebesar itu diharapkan penanganan sampah di Piyungan jauh lebih baik.
- Peningkatan alat dermaga merupakan salah satu upaya optimalisasi TPST Piyungan.
- Perbaikan utama TPST Piyungan adalah upaya pemrosesan sampah.
- Tanpa hal itu, volume sampah di sana dipastikan akan terus membludak.
- Volume sampah yang masuk ke sana per hari mencapai 600 ton/hari.

Anggaran ini di antaranya untuk membangun sejumlah konstruksi, seperti talud dermaga untuk memaksimalkan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan sebelum proses KPBU terlaksana.

"Untuk tahun ini anggaran TPST Piyungan mencapai Rp3,5 miliar. Tahun depan kami anggar Rp14 miliar dalam rangka menangani masalah sampah," jelas Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana di Kepatihan, Kamis (12/12).

Meski demikian, Huda mengatakan tidak hafal benar alokasi anggaran itu untuk apa saja. Akan tetapi, Huda mengatakan jika hal ini

untuk konstruksi dan penanganan sampah yang masuk ke TPST sebelum adanya kerja sama dengan skema KPBU senilai Rp80 miliar. "Ini baru awal sekali kami akan proses hingga tahun 2022, sehingga ada perpanjangan masa TPST sebelum KPBU," paparnya.

Untuk pembangunan konstruksi di TPST Piyungan ini akan dilaksanakan secara bertahap penanganannya. Dengan alokasi sekitar Rp14 miliar, penanganan dipastikan akan jauh sekali dari

• ke halaman 15

Isi	TPST
1. DLH	☐
2.	☐
3.	☐
4.	☐
5.	☐

✓ Netral
✓ Biasa
✓ Untuk diketahui

DAFTAR PUSTAKA

Rp14 Miliar untuk Tangani

• Sambungan Hal 9

tahun ini.

Untuk tahun ini baru studi penanganan dan dukungan pemerintah pusat juga sangat diperlukan. Jika tidak, maka Pemda DIY akan kewalahan. Menurutnya, peninggian talut dermaga merupakan salah satu upaya optimalisasi TPST Piyungan.

"Tahun 2020 ini, kami anggarkan hal-hal yang urgen untuk memenuhi tuntutan masyarakat seperti jalan dan talut. Kami berupaya menjaga agar TPST bisa dipakai dan tidak mengganggu masyarakat," urainya.

Memusnahkan

Meski demikian, Huda menyebut masalah utama TPST Piyungan belum selesai, yakni pemusnahan sampahnya. Pihaknya juga berharap proses KPBU TPST Piyungan ini akan menemukan rekanan yang cocok untuk bisa melakukan proses pemusnahan sampah.

"Karena, kalau tanpa pemusnahan sampah, volume yang masuk besar seperti sekarang ini sudah nambah

terus. Dua tahun lalu sudah 450 ton sekarang sudah 600 ton. Kondisi seperti ini, tetap tidak akan menyelesaikan persoalan sampah di Piyungan," ujarnya.

Pihaknya juga mendorong adanya semacam teknologi untuk pemusnahan sampah di TPST Piyungan ini. Huda menyebutkan, hal ini bisa dimusnahkan dengan teknologi pembakaran. Termasuk, adanya talut ini untuk menahan agar sampah tidak ambrol dan mengenai masyarakat sekitar. "Kalau ambrol kena masyarakat kan repot. Jalan juga dibuat agar tidak rusak," ulasnya.

Untuk pemusnahan sampah, pihaknya memberikan catatan agar tidak mendapatkan rekanan yang menerapkan *tiping fee*. Adanya *tiping fee* ini, maka akan sangat memusingkan Pemda DIY karena adanya dana besar untuk berbagai macam hal. "Harapan kami tidak lagi ada protes masyarakat karena adanya pemusnahan ini," ujarnya.

Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY menyebut terus melakukan upaya untuk mendorong agar ada pengurangan volume sampah

di DIY. Saat ini volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Piyungan mencapai 600 ton per hari dan ditargetkan akan berkurang hingga 30 persen di tahun 2025.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan DLHK DIY, Yohanes Agus Setiyanto menyebut, beberapa langkah yang akan dilaksanakan untuk pengurangan sampah ini di antaranya adalah dengan mendorong kabupaten/kota untuk membentuk Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R). Adanya TPS3R ini diyakini akan menjadi salah satu pendorong untuk mereduksi sampah hingga 6 persen per tahun.

Adapun terkait dengan nasib TPST Piyungan untuk saat ini pemerintah berupaya "memperpanjang napas" dengan berbagai modifikasi. Upaya secara fisik, sebut Agus ini berada di tangan DPUESDM bidang cipta karya. "Biar umurnya panjang dan masih bisa menampung sampah warga DIY. Harapannya sebelum *overload* sudah ada konsep baru," jelasnya. (ais)

Bukan Solusi Terakhir

SEKDA DIY, Kadamanta Baskara Aji mengatakan, TPST Piyungan bukan menjadi solusi akhir dari penanganan sampah di DIY. Pihak Pemda DIY saat ini pun tengah menunggu investor yang akan tertarik untuk bekerjasama dengan skema KPBU.

"Kami tegaskan, penyelesaian sampah dengan TPA ini bukan solusi akhir dan bersifat sementara," jelasnya di acara Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) di Gedhong Pracmosono, Kompleks Kepatihan DIY, Kamis (12/12).

Aji mengatakan, untuk KPBU TPST Piyungan ini Pemda DIY sudah melaksanakan presentasi di Bappenas. Saat ini, pihaknya tengah menunggu investor yang memperhitungkan terkait dengan skema kerja sama

Bukan Solusi Terakhir

● Sambungan Hal 9

ini. "Hal ini karena investor tidak hanya memikirkan secara sosial tapi ekonomis, perlu pertimbangan dan survei. Harapan kami segera diselesaikan," jelasnya.

Aji juga mengatakan, de-

ngan adanya KPBU nantinya bukan hanya menyelesaikan sampah baru. Tetapi, kapasitas sampah dengan volume per hari mencapai 600 ton ini harus diselesaikan. Untuk teknologi pengolahan sampah pun akan menjadi salah satu pokok yang akan dicapai dengan KPBU. "Ada teknologi pengolahan sampah menjadi briket, dan sebagainya," urainya.

Edukasi pada masyarakat pun menjadi sangat penting agar akar masalah dari sampah ini bisa diatasi. "Perlunya pemisahan sampah organik dan anorganik dan didukung perubahan *mindset* memperlakukan sampah harus diedukasi terus. Penampungan bukan solusi final. Memilah menjadi hal yang ditawarkan pada masyarakat," jelasnya. (als)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005